

KETERLIBATAN PEREMPUAN DI TENGAH POLITIK MASKULIN DALAM PERSPEKTIF POLITIK GLOBAL STUDI KASUS: GULF WOMEN IN SAUDI ARABIA

Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar¹, Ananda Clarissa², Muhammad
Noval Ramadhan³, Muhammad Daffa Adillah⁴,
Sachtzi Nisfiani⁵

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2,3,4,5}

*E-mail: 2110413051@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Gulf Women memiliki peran yang penting dalam kesetaraan gender, dimana dengan kehadiran organisasi ini reformasi sosial-ekonomi serta partisipasi perempuan dapat berjalan dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan di Arab Saudi. Selain itu, program Saudi Vision 2030 merupakan upaya yang dilakukan Arab Saudi sebagai salah satu langkah perubahan dalam rangka kesetaraan gender. Sektor perekonomian juga menjadi salah satu fokus utama hadirnya Saudi Vision 2030, diharapkan bahwa Arab Saudi tidak lagi hanya mengandalkan sektor perminyakan tetapi juga dapat meraih pendapatan dari sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan fokus pada pengamatan yang mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gulf Women didukung dengan program Saudi Vision 2030 memiliki peran dalam perubahan yang signifikan dalam cara pandang dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Saudi diberikan. Dengan demikian, Saudi Vision 2030 merupakan sebuah langkah berani dari Arab Saudi untuk melakukan perubahan masif terhadap struktur perekonomian dan sosial. Strategi ini berhasil memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor perekonomian dan pariwisata. Selain itu, strategi ini juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat khususnya perempuan.

Kata Kunci: *Gulf Women, Arab Saudi, Saudi Vision 2030, Gender*

ABSTRACT

Gulf Women has an important role in gender equality, where with the presence of this organization socio-economic reform and women's participation can run well in various aspects of life in Saudi Arabia. In addition, the Saudi Vision 2030 program is an effort made by Saudi Arabia as one of the steps of change in the framework of gender equality. The economic sector is also one of the main focuses of the presence of Saudi Vision 2030, it is hoped that Saudi Arabia will no longer rely solely on the petroleum sector but can also gain revenue from the tourism sector. This research uses qualitative research methods with descriptive methods. The qualitative method itself is a research method that is descriptive and focuses

on in-depth observations. The results of this study show that Gulf Women supported by the Saudi Vision 2030 program has a role in significant changes in the perspective and participation of women in social, economic and political life in Saudi Arabia. Thus, Saudi Vision 2030 is a rare bold move from Saudi Arabia to make massive changes to the economic and social structure. This strategy has had a significant impact on the economy and tourism sector. In addition, this strategy also has a positive impact on society, especially women.

Keywords: *Gulf Women, Saudi Arabia, Saudi Vision 2030, Equality Gender*

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender masih menjadi tantangan di kehidupan kontemporer ini. Masih banyak kesenjangan yang lahir dimana perempuan masih belum dapat merasakan kesetaraan hak secara keseluruhan, hal tersebut dikarenakan karena sering terlihat dalam korelasi sosial yang terjadi di masyarakat masih terdapat bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kesamaan hak serta fundamental sosial antar manusia merupakan hal yang vital dalam konteks persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut agar manusia tidak menoleransi bentuk diskriminasi apapun antara sesama manusia, baik atas nama kekuatan (Indira, 2018). Atas reaksi tersebutlah timbul gerakan yang mana untuk menuntut keadilan dan kesetaraan untuk perempuan sehingga segala bentuk diskriminasi dan persamaan tersebut bisa berkurang bahkan hilang.

Arab Saudi merupakan negara yang berbentuk monarki absolut dan masih memegang dan menegakan syariat islam, dimana kekuasaan tertinggi berada pada raja yang berarti raja

menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Raja yang saat ini sedang menduduki tahta ialah Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Hal tersebut mengakibatkan kekuasaan terpusat dan memiliki anggota keluarga kerajaan memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal ini dapat terlihat dimana anggota keluarga kerajaan mendapatkan posisi yang sentral dalam menentukan arah Arab Saudi itu sendiri. Pada masa pemerintahannya, Raja Salman mempromosikan dan memberikan keleluasaan otoritas untuk Pangeran Mohammed bin Salman sebagai putra mahkota untuk dirinya melahirkan system baru terhadap Arab Saudi, melalui Saudi Vision 2030 yang mana ini merupakan strategi agar tidak bergantung pada minyak (Mislihariha, dkk, 2021).

Sebagai negara yang masih menjunjung nilai islam yang sangat kuat cukup mempengaruhi posisi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan dalam islam tentunya tidak lepas dari pengaruh paham dimana perempuan dianggap nomor kesekian setelah suaminya, mereka harus *sami'na wa atho'na* dibawah

suami sebagai kepala rumah tangga (Rosida, 2018). Karena sentimen tersebut pun mempengaruhi juga ke kehidupan sosial karena sehingga partisipasi politik perempuan terpengaruh hasilnya, dimana angka keterlibatan perempuan menjadi terpengaruh.

Pada tahun 2017, saat Mohammed bin Salman (MbS) diangkat menjadi putra mahkota di Arab Saudi, pada saat itu juga terdengar nyaring mengenai reformasi di sana. Setelah itu MbS memberlakukan beberapa peraturan atau kebijakan yang bertujuan untuk merubah budaya di Saudi dimana sebelumnya ultrakonservatif menjadi lebih moderat, terutama pada saat penerapan hukum syariat Islam. Beberapa tanggapan dari berbagai pihak beranggapan bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi Arab Saudi dan menarik investasi asing terutama negara Barat.

Tetapi nyatanya reformasi norma serta nilai-nilai sosial sudah jauh lebih dulu diproyeksikan sejak ayah dari MbS berkuasa pada 2015 lalu, yaitu Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud. Adanya polisi keagamaan yang diberlakukan pada 2016 juga berada di bawah arahan raja langsung, tugas dari polisi keagamaan ini ialah menegakkan ketaatan dalam beragama serta moralitas publik seperti cara berpakaian, ketaatan beribadah, dll yang berlandaskan hukum Islam, polisi keagamaan juga dapat menjatuhkan

sanksi bagi yang melanggar. Lalu saat putra mahkota MbS menjadi pemimpin, reformasi sosial yang ia berlakukan ialah wanita di Arab Saudi diperbolehkan mengendarai mobil sendiri dimulai pada tahun 2018, adanya pelanggaran terhadap batasan hiburan dan kegiatan untuk mengisi waktu luang seperti membuka bioskop atau konser musik. Peningkatan peran perempuan pun juga turut diperhatikan oleh MbS dimana hal ini dapat terlihat dari perizinan untuk memasuki stadion olahraga serta mengurangi kekuatan dari polisi moral (polisi keagamaan).

METODE

Penelitian pada kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan fokus pada pengamatan yang mendalam. Dalam metode kualitatif, proses dan makna atau perspektif subjek pada penelitian lebih ditonjolkan, berbanding dengan metode kuantitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data yang mendalam dan detail.

Dalam metode kualitatif, teori atau landasan teori digunakan sebagai pemandu untuk membuat proses penelitian lebih fokus dan sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Gulf Women Terhadap Masyarakat Arab Saudi

Gulf Women merupakan sebuah sebutan bagi para wanita yang tinggal di negara “gulf” contohnya seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Kuwait dimana para wanita ini dipengaruhi oleh organisasi wanita yang disponsori oleh negara seperti kebijakan pemerintah serta norma-norma yang membentuk peran, hak, dan pemberdayaan mereka di wilayah tersebut. Para wanita ini kemudian didorong untuk berpartisipasi dalam pendidikan, tenaga kerja, dan asosiasi yang dikelola negara, dengan status pribadi mereka yang sering kali ditentukan oleh hukum Islam. Negara-negara tersebut menggunakan mekanisme kontrol, termasuk juga organisasi wanita dengan tujuan untuk mendorong adanya pemberdayaan wanita dalam batas-batas yang ditetapkan oleh negara dan untuk memperkuat peran gender (Krause, 2013).

Organisasi ini kemudian memiliki peran terhadap negara yaitu membantu tujuan pemerintah, mempengaruhi perubahan, dan memainkan peran penting dalam pembangunan, yang berfungsi sebagai modal dalam tata kelola negara. Seiring dengan berjalannya waktu pun wanita-wanita ini semakin banyak pula mengambil posisi di pemerintahan dan bisnis, membuat pencapaian bersejarah dalam kehidupan publik,

tetapi disamping itu mereka tetap berjuang untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraan. Negara-negara yang berada di wilayah gulf seperti Arab Saudi memainkan peran wanita sebagai “ibu bangsa” yang bertanggungjawab untuk mempertahankan struktur keluarga tradisional dan berkontribusi pada proyek pembangunan identitas dan stabilitas internal. Asosiasi wanita yang didukung pemerintah berfokus pada bidang yang dianggap “apolitis” seperti pengajian, hadis, dan topik-topik yang berkaitan dengan peran keluarga, masyarakat, dan pengetahuan Islam.

Di Arab Saudi sendiri, terdapat beberapa peran yang dimiliki Gulf Women disana salam masyarakatnya, yaitu dalam beberapa aspek. Aspek pertama adalah pendidikan dimana dalam beberapa waktu terakhir, tingkat pendidikan di Arab Saudi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan dibuktikan dengan adanya partisipasi wanita yang semakin tinggi dalam akademik pendidikan. Selanjutnya aspek kedua yaitu tenaga kerja yang bisa dilihat bahwa mulai banyak wanita di Arab Saudi yang bekerja di berbagai sektor contohnya seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, bahkan pada pemerintahan. Aspek ketiga yaitu kewirausahaan, banyak wanita Arab Saudi yang sudah memiliki usaha dan menjadi pengusaha sukses. Setelah itu ada aspek sosial, banyak wanita di sana

yang aktif dalam kegiatan seperti menjadi aktivis sosial dengan tujuan untuk mendorong reformasi sosial seperti memperjuangkan hak-hak wanita yaitu mengemudi dan mengikuti kegiatan olahraga. Dalam aspek seni budaya pun banyak wanita Arab Saudi yang berkontribusi dalam sastra, seni, visual, dan musik. Meskipun peran wanita Gulf Women sangat berpengaruh di wilayah Arab Saudi, tetapi negara tersebut tetap menerapkan tradisi mereka yaitu wanita tetap memegang peran penting untuk mengurus keluarga dan anak-anak.

Mendorong Kepemimpinan Perempuan Melalui Saudi Vision 2030

Saudi Vision 2030 merupakan kerangka kerja Arab Saudi yang telah disahkan oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman dalam periode pemerintahan Raja Salman. Pada tahun 2016 secara resmi *Saudi Vision 2030* diperkenalkan kepada publik oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman. *Saudi Vision 2030* berisikan terkait tujuan dengan jangka waktu yang panjang dan pembentukannya didasarkan oleh kekuatan serta kemampuan unik yang dimiliki Kerajaan Arab Saudi. Perencanaan terkait perubahan besar yang telah direncanakan dalam *Saudi Vision 2030* didukung dengan penerapan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk memperbaiki permasalahan terkait kualitas

kehidupan di Kerajaan Arab Saudi, kemudian menguntungkan masyarakat Arab Saudi dan menarik investasi baik dalam wilayah domestik maupun luar negeri (Abdellatif, 2019). *Saudi Vision 2030* dalam rangka Agenda Pembangunan Berkelanjutan memiliki 3 pilar utama yang terkandung adalah *A Vibrant Society*, *Thriving Economy*, dan *An Ambition*. Putra Mahkota Salman dalam mewujudkan *Saudi Vision 2030* telah melakukan beberapa reformasi yang krusial pada sektor politik, sosial, dan memodifikasi sektor perekonomian. Reformasi sosial terkait *Saudi Vision 2030* menghasilkan kebijakan-kebijakan yang membawa pengaruh besar terhadap kehidupan perempuan di Arab Saudi. Sebagai salah satu contoh kebijakan krusial dalam perwujudan memenuhi hak-hak Perempuan di Arab Saudi adalah telah dilakukannya reformasi terhadap sistem perwalian (General Authority for Statistics Saudi Arabia, 2018).

Langkah masif tersebut diambil oleh pemerintah Arab Saudi untuk merubah sudut pandang terhadap negara Arab Saudi. Dimana, Arab Saudi dipandang sebagai negara yang sangat konservatif. Hal tersebut telah menimbulkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Maka dengan dilakukannya reformasi perwalian, secara otonom perempuan dapat melakukan pekerjaan serta mendapatkan hak-hak yang

sebelumnya mereka tidak mendapatkan yang diakibatkan oleh sistem perwalian. Oleh karena itu, penerapan reformasi terhadap sistem perwalian maka perempuan telah mendapatkan kembali tempat yang seharusnya mereka dapatkan di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan strategis *Saudi Vision 2030* yakni pemberdayaan terhadap perempuan. Arahan tersebut diberikan oleh Raja Salman bersama dengan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman untuk memberikan penjagaan serta prioritas terhadap perempuan (Sannaudin, 2013).

Upaya tersebut menunjukkan membuahkan hasil yang signifikan terhadap kehidupan sosial para perempuan di Arab Saudi. Persentase jumlah perempuan dalam sektor tenaga kerja mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi 34,7 persen yang sebelumnya hanya menyentuh di angka 21,2 persen. Kemudian, rata-rata tingkat partisipasi ekonomi dalam periode 2017 dan 2022 mengalami lonjakan di angka 37 persen yang sebelumnya hanya berada di angka 17 persen. Selain itu, pada persentase terkait keterwakilan perempuan selama periode 2017-2021 dalam bidang politik mengalami peningkatan dari angka 28,6 persen menjadi 39 persen. Sejalan dengan hal tersebut, penurunan yang signifikan juga terjadi pada tingkat pengangguran, dimana dari angka 11,6 persen turun menjadi

5,8 persen dalam jangka waktu lima tahun terakhir (Republika, 2023).

Secara keseluruhan jumlah proporsi perempuan yang bekerja secara aktif di Arab Saudi mengalami kenaikan dari 21 persen menjadi 35 persen. Hal ini didukung juga dengan kebijakan nasional dengan tupoksi pengelolaan terkait diskriminasi dengan mempromosikan kesempatan serta perlakuan yang sama antar laki-laki dan perempuan baik dalam sektor tenaga kerja maupun secara bermasyarakat. Salah satu faktor pendorong terbesar untuk dilakukannya perubahan norma dan identitas negara Arab Saudi adalah dikarenakan telah terjadi perubahan kepentingan negara. Selain itu, Arab Saudi mulai menyadari bahwa kekayaan minyak yang dimilikinya merupakan sumber daya yang akan habis (Kinninmont, 2017). Dengan begitu, Pemerintah Arab Saudi mengambil langkah preventif dengan menghadirkan *Saudi Vision 2030*.

Diharapkan dengan kehadiran visi tersebut negara Arab Saudi tidak lagi hanya mengandalkan sektor perekonomian dari sektor minyak saja tetapi dapat mengembangkan sektor lainnya seperti sektor pariwisata. Tujuan tersebut selaras dengan kebijakan telah dicanangkan oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman yang menerapkan pemberlakuan memberikan kesempatan yang sama terhadap bagi para perempuan Arab Saudi untuk

mengambil peran di dalam kehidupan bermasyarakat baik dalam terkait bidang apapun. Sehingga, diharapkan laki-laki dan perempuan dapat bersaing secara sehat berdasarkan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki (Syaputra dan Prasodjo, 2023).

Jika kita menelaah lebih jauh pada dasarnya isu kesetaraan gender menjadi *free rider* dalam hal ini. Sebab, bahwasannya pemerintah Arab Saudi sadar akan ketersediaan minyak yang kian menipis. Oleh karena itu, perempuan di Arab Saudi diperbolehkan untuk memiliki kesempatan bekerja. Tujuan hal tersebut ialah agar pendapatan mendapatkan penambahan dan tidak lagi hanya mengandalkan dari sektor minyak saja yang sudah menjadi sumber utama pendapatan utama Arab Saudi selama ini. Sehingga, untuk itu Arab Saudi dalam proses perumusan serta penetapan peraturan dan dalam menentukan langkah baru lebih mengedepankan kesetaraan gender dalam rangka memberikan kesempatan yang sama untuk perempuan untuk dapat bersaing dengan laki-laki. Dengan demikian, bahwa dengan hadirnya Saudi Vision 2030 menjadi angin segar bagi para perempuan di Arab Saudi. Sebab, mereka tidak lagi dibatasi oleh peraturan-peraturan yang membatasi kebebasan mereka (Winarni dan Permana, 2022).

KESIMPULAN

Peran Gulf Women di Arab Saudi dan upaya untuk mendorong kepemimpinan perempuan melalui Saudi Vision 2030, kami menyimpulkan bahwa perubahan signifikan sedang terjadi dalam cara pandang dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Saudi diberikan kepada Arab Saudi. Meskipun hambatan dan tantangan masih ada, langkah-langkah reformasi yang diambil oleh pemerintah, seperti reformasi perwalian dan peningkatan kesetaraan gender, memberikan dampak positif yang signifikan.

Peran Gulf Women berkembang pesat, khususnya di bidang pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, partisipasi sosial, seni dan budaya. Secara tradisional, penekanannya masih pada penempatan perempuan dalam aktivitas rumah tangga, namun meningkatnya jumlah perempuan di berbagai bidang menandakan adanya perubahan paradigma dalam masyarakat Saudi. Saudi Vision 2030 merupakan tonggak penting dalam pemberdayaan perempuan di Arab Saudi dengan menetapkan tujuan pembangunan jangka panjang yang memasukkan kesetaraan gender sebagai salah satu poin utamanya. Reformasi sosial-ekonomi yang digalakkan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Saran yang dapat kami berikan adalah

terus mendorong penerapan kebijakan progresif yang mendukung pemberdayaan perempuan, dan mengatasi hambatan budaya dan struktural yang masih menghalangi partisipasi penuh perempuan di Arab Saudi. Penting juga untuk terus memberikan pendidikan dan kesempatan yang setara bagi perempuan di bidang-bidang yang selama ini dianggap didominasi laki-laki, seperti sains, teknologi, teknik, dan politik. Dengan cara ini, Arab Saudi dapat mencapai visinya mengenai pembangunan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruharganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdellatif, R. (2019). What you need to know: A timeline of Saudi Arabia's Vision 2030 reforms. Alarabiya. <https://english.alarabiya.net/en/business/economy/2019/10/28/What-you-need-to-know-Atimeline-of-Saudi-Arabia-s-key-Vision-2030-reforms.html>.
- Anis, R. (2018). Wacana Modernisasi dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan sebagai Tonggak Sejarah Arab Saudi. *Journal of Social-Religion Research*, 3 (1), 81 - 96.
- Devriese, L. (2008). Renegotiating Feminist Praxis in The Arabian Gulf. *Cultural Dynamics*, 2(1), 73-94.
- Findlow, S. (2013). Higher Education and Feminism in The Arab Gulf. *British Journal of Sociology of Education*, 34(1), 112-131.
- General Authority for Statistics Saudi Arabia. (2018). Sustainable Development Goals (SDGs) in KSA (Status-quo Statistical Report) 2018. https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/sustainable_development_goals_sdgs_in_ksa_en.pdf.
- Golkowska, K. U. (2014). Arab Women in The Gulf and The Narrative of Change : The Case of Qatar. *International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal*, 16(1), 51-64.
- Indira, Fatra Deni P. (2018). Gender di Dunia Islam. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 5 (5), 40 - 53.
- Istiana Hasan, N., & Kurnia Putra, A. (2020). Peran perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(2), 169-192.
- Kinninmont, J. (2017). Vision 2030 and Saudi Arabia's Social Contract Austerity and Transformation. Chatham House The Royal Institute of International Affairs. <https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2017-07-20-vision-2030-saudi-kinninmont.pdf>.
- Krause, W. (2013). Gender and participation in the Arab Gulf. In *The transformation of the Gulf* (pp. 86-105). Routledge.

- McClain, Linda C., and Brittany K. Hacker, 'Liberal Feminist Jurisprudence: Foundational, Enduring, Adaptive', in Deborah Brake, Martha Chamallas, and Verna L. Williams (eds), *The Oxford Handbook of Feminism and Law in the United States* (2023; online edn, Oxford Academic, 9 June 2021), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197519998.013.2>.
- Misliharira, S. P., Reni, W., Satwika P. (2021). Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi dalam Saudi Vision 2030. *Jurnal of International Relations*, 7 (3), 123 - 130.
- Osisoma, S. L. (2022). The Major Link in Global Politics. World
- Journa of Advanced Research and Reviews, 16(3), 924-926.
- Republika. (2023). Wanita yang Bekerja di Arab Saudi Melonjak, Ini Penyebabnya. <https://republika.co.id/amp/rqth6v430/wanita-yang-bekerja-di-arab-saudi-melonjak-ini-penyebabnya>.
- Sanauddin, N. (2013). A Most Masculine State: Gender, Politics, and Religion in Saudi Arabia by Madawi Al-Rasheed (12), p. 3 https://www.gla.ac.uk/media/media_298317_en.pdf.
- Strobl, S. (2016). The Dream Recently Came True: Globalization and Media Discourse about Kuwaiti Policewomen. NIDABA Interdisciplinary Journal of Middle East Studies, 1(1), 6-18.
- Susanto, N. H. (2015). Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki. *Muwazah*, 7(2).
- Syaputra, F., F dan Prasodjo, H. (2023). Saudi Arabia's Efforts in Implementing Saudi Vision 2030. *Jurnal Public Policy*, 9(1), 35-45.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83.
- Winarni, L dan Permana, N., Y., P., A. (2022). Saudi Vision 2030 and the Challenge of Competitive Identity Transformation in Saudi Arabia. *Journal of Islamic World and Politics*, 6(1), 60-67.